

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah berencana memperketat syarat perjalanan ke luar negeri. Sebab dari hasil pendalaman yang dilakukan KSP bersama Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, banyak warga bepegangan ke luar negeri untuk tujuan wisata.

"Dilaporkan bahwa jumlah orang ke luar negeri untuk tujuan wisata masih banyak. Hasil pendalaman KSP dengan Ditjen Imigrasi, syarat perjalanan ke luar negeri perlu diperketat," ujar Moeldoko dalam siaran pers KSP, Rabu (19/1).

Menurut Moeldoko, salah satu tantangan dalam melaku-

kan pembatasan adalah identifikasi tujuan orang ke luar negeri. Sebab, kata dia, praktik di lapangan menunjukkan tidak sedikit yang ke luar negeri mengaku untuk bekerja namun sebenarnya untuk wisata dan juga sebaliknya.

"Nanti Ditjen Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPCCPEN, Satgas dan Kemenkes untuk menindaklanjuti rencana ini," kata Moeldoko.

Rencana pengetatan syarat perjalanan ke luar negeri akan dikawalikan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI), mahasiswa, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendesak, seperti alasan kesehatan atau kemanusiaan. ● han

BIN dan PPAK Cek Rekam Jejak Para Calon Anggota KPU-Bawaslu

JAKARTA (IM) - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro mengungkapkan, pihaknya meminta bantuan lembaga negara untuk menyurvei rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Kami meminta bantuan kepada beberapa lembaga negara untuk melakukan tracing, terhadap setiap bakal calon," kata Juri dalam rapat dengar pendapat umum (RDP) Komisi II DPR dengan Panitia Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu, Rabu (19/1).

Lembaga negara itu bertugas memeriksa rekam jejak para bakal calon anggota mulai dari transaksi keuangan, komitmen kebangsaan, kepemimpinan, relasi dengan keluarga dan tetangganya, hingga track record kerja sebelumnya.

"Semuanya kami potret dan kami profiling dan akhirnya itu jadi bahan pertimbangan untuk menilai, memutuskan 14 orang calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu," katanya.

Lembaga negara yang diminta bantuan yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.

Dari seleksi itu, Timsel mengaku sudah berusaha keras untuk membuat postur anggota yang merepresentasikan berbagai pertimbangannya. "Seperti gender, meskipun di KPU belum sampai 30 persen, namun untuk Bawaslu sudah 30 persen," kata Juri. ● mei



RDP DIRUT BPJS KESEHATAN DENGAN KOMISI IX DPR RI

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Rapat dengar pendapat tersebut terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2022.

INGIN SUJUD MINTA MAAF DI DPR

Risma: Tidak Ada Salah Koprak, yang Ada Salah Jenderal ...

JAKARTA (IM) - Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini meminta maaf kepada Komisi VIII DPR RI. Permintaan maaf terkait sikap jajarannya yang dinilai tidak pantas dalam berkomunikasi dengan pihak legislatif.

Mensos Risma mengaku tidak tahu persoalan terkait Sekjen Kemensos, Harry Hikmat, hingga diusir oleh Komisi VIII DPR RI. Risma menyebut tidak tahu isi pesan yang dikirimkan Harry kepada para anggota Komisi VIII DPR, khususnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, hingga berujung pada pengusiran.

"Aku juga nggak tahu (soal apa), aku juga nggak tahu (isi WhatsApp Sekjen) tuh, Nggak tahu serius atau nggak tahu," kata Risma kepada wartawan selepas rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (19/1).

Meski tidak tahu-menahu, Risma menyebut harus tetap meminta maaf atas nama Sekjeny. Dia menyebut jika salah memang harus minta maaf. Saat meminta maaf itu, Risma terlihat ingin ber-sujud memohon maaf kepada jajaran Komisi VIII DPR RI yang hadir pada rapat kerja Rabu (19/1). Namun, sebelum bersujud dirinya dicegah oleh pimpinan Komisi VIII DPR RI.

"Saya sebagai pimpinan dan itu sering saya buktikan, saya selalu sampaikan tidak ada salah koprak, yang ada salah jenderal, saya jenderal, saya jenderal karena saya karena itu saya atas nama siapa pun

di Kemensos pak sekjen, saya minta nanti minta maaf. Kalaupun pak sekjen ke luar harus minta maaf, baik secara pribadi saya minta maaf," ucap Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengakui adanya komunikasi yang buruk antar lembaga. Hingga Mensos ingin bersujud di depan Komisi VIII DPR RI. Politikus PDIP ini mengakui kurangnya komunikasi tersebut tidak lain adanya ketegangan tim kemensos dalam menyalurkan bansos PPKM dan kemiskinan ekstrem.

Hanya saja Risma tidak menjelaskan secara detail daerah mana yang diberikan bantuan tersebut.

Mensos meminta agar Sekjen Kemensos, Harry Hikmat, diperkenankan untuk meminta maaf kepada Komisi VIII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyebut sikap Sekjen Kemensos dinilai sinis terhadap pekerjaan DPR RI sebagai fungsi pengawasan lembaga pemerintah.

"Saya terus terang saja, ketika ibu ke dapil saya, kemudian tidak memberitahu ke dapil kami padahal kesepakatan kita bersama dalam setiap kali ibu menteri ke dapil setidaknya diberikan informasi yang mengatur adalah Sekjen," ujarnya.

"Sekjen waktu itu memang minta maaf, tapi setelah itu nyerocon, bilang apa yang saya lakukan itu sinis, bahwa saya diundang oleh kemensos tidak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu?" ucap Ace. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KASUS KORUPSI PT ASABRI

Divonis Nihil Penjara, Hakim Minta Jaksa Kembalikan Belasan Kapal Milik Heru Hidayat

Kendati dinyatakan terbukti korupsi dana PT Asabri, namun hakim menjatuhkan vonis nihil penjara terhadap Heru Hidayat. Heru sebelumnya divonis seumur hidup dalam kasus Jiwa Seraya.

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana PT Asabri yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Heru juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (IPPU).

Kendati dinyatakan bersalah, namun hakim menolak tuntutan hukuman mati seperti yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Hakim justru menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru Hidayat.

Hakim menjatuhkan pidana penjara nihil di kasus Asabri karena Heru Hidayat telah mendapatkan hukuman maksimal di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Di mana, Heru Hidayat telah divonis hukuman seumur hidup pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru Hidayat berupa kewajiban untuk membayar uang

pengganti. Heru Hidayat diwajibkan untuk membayar uang pengganti di kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri sebesar Rp12,6 triliun.

Vonis tersebut diketahui jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa. Di mana sebelumnya, tim jaksa menuntut agar Heru Hidayat dihukum pidana mati. Sebab, Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera diyakini terbukti melakukan korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan JPU untuk mengembalikan sejumlah aset milik Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM), Heru Hidayat yang disita di kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Di antaranya, berupa belasan kapal milik Heru.

Menurut hakim, aset seperti kapal jenis Liquefied Natural Gas (LNG) Aquarius milik Heru Hidayat yang disita jaksa, tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PT Asabri dan pencucian

uang. Hal itu disimpulkan hakim setelah mencermati sejumlah fakta-fakta persidangan.

"Seluruh dokumen kapal terbukti dimiliki PT Hanochem Shipping, jauh sebelum tindak pidana korupsi dalam perkara ini," ujar Anggota Majelis Hakim, Ali Muhtarom saat membacakan pertimbangan putusan Heru Hidayat di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam.

Hakim membeberkan sejumlah kapal yang diminta untuk dikembalikan jaksa kepada Heru Hidayat. Ada empat kapal sitaan jaksa yang dinyatakan tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana Heru Hidayat.

Keempat kapal itu yakni, Kapal Pasmar 01, Kapal Taurians One, Kapal Taurians Two, dan Kapal Taurians Three. Hakim juga memutuskan bahwa 13 kapal milik PT Jelajah Bahar Utama yang disita jaksa dalam perkara ini dikembalikan. Belasan kapal tersebut di antaranya, Kapal ARK 03, Kapal ARK 01, Kapal ARK 02, Kapal ARK 05, dan Kapal ARK 06.

Kemudian Kapal Noah 1, Kapal Noah 2, Kapal Noah 3, Kapal Noah 5, Kapal Noah 6, Kapal TBG 306, Kapal TBG 301, dan Kapal TBG 2007.

"Kapal-kapal milik PT Trada Alam Minera tbk. (4 kapal) terbukti dimiliki jauh sebelum tindak pidana korupsi sehingga bukan hasil tindak pidana. Harus dikembalikan," beber Hakim Ali.

"Barang bukti kapal-kapal

milik PT Jelajah Bahar Utama (13 kapal) beserta dokumen kapal terbukti dimiliki jauh

APEL GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan depan) membuka apel nasional gabungan pengawasan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/1). Dalam rangka penerapan hukum keimigrasian, Imigrasi kelas I khusus TPI Batam menggelar apel gabungan bersama TNI, POLRI, dan instansi terkait pengawasan.

sebelum tindak pidana. Harus dikembalikan," kata hakim. ● han

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN 'Nusantara'

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR telah mberdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait proses pemindahan kompleks lingkungan parlemen dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat disebut akan masuk dalam tahap pertama sebagai lembaga yang bakal dipindah ke IKN. "Dalam draft yang disampaikan Bappenas begitu. Kami diminta untuk exercise terhadap tiga eselon 1 untuk tahap awal," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat dihubungi wartawan, Rabu (19/1).

Indra mengatakan, antara DPR dan Bappenas juga sudah berulang kali melakukan diskusi terkait hal tersebut. Hal itu dibahas DPR melalui lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Pada prinsipnya, kata Indra, DPR akan mengikuti road map yang telah disiapkan pemerintah terkait pemindahan ke IKN.

"Kami sudah diminta masukan oleh Bappenas untuk klaster pertama yang direncanakan di tahap awal ke ibu kota baru," jelasnya.

Indra tak memungkiri apa-

bila ada konsep workcation seperti yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Suharso mengatakan, IKN bakal menyuguhkan konsep ruang kerja modern yakni workcation. Sehingga, kota ini nantinya juga memberikan kenyamanan dalam bekerja dengan cara-cara yang baru.

"Tentu berkaitan dengan cara kerja pun sudah kami bahas agar nantinya indeks kebahagiaan pegawai dan pejabat harus lebih baik. Dan itu sedang kami rintis dari sekarang ini antarnya dengan tandingan elektronik, disposisi elektronik dan cara kerja yang bisa dilakukan di manapun," ungkap Indra.

Dia menambahkan, adaptasi ekosistem kerja ke depannya apabila DPR resmi pindah ke IKN pun sudah dipersiapkan. Termasuk, kata Indra, soal antisipasi dari ekosistem kerja seperti yang dimaksud. Ia mencontohkan bahwa berkaitan dengan persidangan harus tetap dengan teknis pertemuan tatap muka. "Berkaitan dengan persidangan-persidangan tetap harus touching, karena perlu pengaturan-pengaturan fisik," ucapnya. ● mei

GELEDAH TIGA LOKASI

Tim Kejagung Sita 3 Kontainer Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

JAKARTA (IM) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap di tiga tiga lokasi. Pengeledahan tersebut terkait kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur Kementerian Pertahanan.

Kapuspem Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pengeledahan dan penyitaan dilakukan pada Selasa (18/1) kemarin di tiga lokasi, yakni dua kantor dan satu apartemen. "Penyidikan Jampidsud Kejagung telah melaksanakan tindakan pengeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021," kata Leonard Rabu (19/1).

Tiga lokasi yang digeledah ialah dua perusahaan swasta dan satu apartemen. Pengeledahan dan penyitaan tersebut di antaranya Kantor PT Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan. Kemudian, kantor PT Dini Nusa Kusuma yang beralamat di Panin Tower Senayan City Lantai 18A Jakarta Pusat. "Apartemen milik saksi SW (Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma/Tim Ahli Kementerian Pertahanan)," jelasnya.

Sejumlah barang yang

disita oleh Jaksa Penyidik pada lokasi tersebut di antaranya tiga kontainer plastik dokumen. Barang bukti elektronik dengan total kurang lebih 30 buah.

"Terhadap barang yang disita tersebut akan dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menjelaskan, proyek itu bermula ketika pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda 1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Dengan demikian, terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), kata Mahfud, negara yang telah

mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Jika tak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan bisa digunakan negara lain.

Untuk mengisi kosongnya pengelolaan slot orbit itu, Kemkominfo memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan. Hal itu bertujuan untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Mahfud menambahkan, dalam upaya membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan lain yang anggarannya juga belum tersedia. Di antaranya, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat.

"Sedangkan di 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan," ungkapnya. ● han

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY MOMENTUM FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY MOMENTUM FUND dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY MOMENTUM FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyetaraan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyetaraan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyetaraan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyetaraan yang semula "Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi";
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyetaraan yang semula "Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)"; dan
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyetaraan REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY MOMENTUM FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA  

Jakarta, 20 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Likuidator mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Circular Resolutions In Lieu Of An Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. CW Indonesia selanjutnya disebut "Perseroan" tertanggal 13 Januari 2022 dan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3 dibuat di hadapan Novita Puspiatini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:
 - Menyetujui untuk membubarkan (melikuidasi) Perseroan efektif sejak tanggal 14 Januari 2022, karena Perseroan sudah tidak aktif lagi menjalankan kegiatan operasionalnya;
 - Menyetujui untuk menunjuk Bp. Dengat selaku Likuidator Perseroan.
- Berkenaan dengan pembubaran Perseroan tersebut di atas, guna melakukan pembebasan terhadap harta kekayaan Perseroan, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tagihannya secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan pada alamat Likuidator di:

Jalan Tanah Lapang Keel No. 13,
Hamdam, Kecamatan Medan Maimun, Medan Kota – 20212
email : cwindonesia88@gmail.com

Jakarta, 20 Januari 2022
LIKUIDATOR